

Analisis kebijakan impor beras terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia

Jiuhardi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan impor beras terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 mendukung kesejahteraan petani padi, walaupun kebijakan impor beras itu adalah kebijakan yang salah. Kebijakan impor beras yang disertai dengan ditetapkannya bea masuk beras akan melindungi daya saing beras domestik, menjaga stabilitas harga dan penyerapan produksi beras domestik serta mendorong harga Gabah Kering Panen di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah sehingga lebih menguntungkan petani. Bagi petani sendiri, impor beras dapat memacu petani untuk meningkatkan kualitas panen beras yang lebih baik dari pada panen sebelumnya. Impor Beras dalam jangka pendek dilakukan sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara lain stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk jangka panjang sebaiknya impor beras tidak lagi dilakukan oleh pemerintah dan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh petani dalam negeri.

Kata kunci: Impor beras; kesejahteraan petani

Analisis kebijakan impor beras terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia

Abstract

This study aims to analyze rice import policies towards improving the welfare of farmers in Indonesia. Data collection uses secondary data through library research. The data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the research show that the rice import policy as stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 01 of 2018 supports the welfare of rice farmers, even though the rice import policy is a wrong policy. The rice import policy accompanied by the stipulation of rice import duties will protect the competitiveness of domestic rice, maintain price stability and absorb domestic rice production and push the price of dry harvested unhusked rice at the farm level above the government purchase price so that it is more profitable for farmers. For the farmers themselves, rice imports can spur farmers to improve the quality of the rice harvest which is better than the previous harvest. Rice imports in the short term are carried out as reserves which can be used at any time by the Government for purposes including price stabilization, handling emergencies, the poor, food insecurity, and certain conditions stipulated by the Government. Meanwhile, for the long term, the government should no longer import rice and prioritize the needs of the community to be met by domestic farmers.

Key words: Rice import; farmers welfare

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 mencapai Rp4 919,9 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp2 923,7 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan II- 2021 tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y). Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen (q-to-q). Salah satu sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar sebesar 13,15 persen (BPS, 2022).

Indonesia merupakan Negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah 251,38 juta jiwa. Sebanyak 11,24 persen atau 28,28 juta penduduk masih hidup dalam kategori miskin. Sebagian besar penduduk miskin tersebut bertempat tinggal di perdesaan dan menggantungkan hidup di sektor pertanian.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 38,07 juta jiwa. Di sisi lain, kesejahteraan petani masih rendah. Jumlah rumah tangga petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau 55,33 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan (BPS, 2022). Sebagian besar orang miskin bekerja di sektor pertanian dan menghadapi situasi rawan pangan (Bank Dunia, 2008). Kemiskinan dan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya di sektor pertanian.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencukupi kebutuhan pangan. Seiring peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pangan semakin meningkat. Di sisi lain, sebagian besar penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian masih tergolong miskin. Laporan Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) menyebutkan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Guna mencukupi kebutuhan pangan, Pemerintah membuka kran impor beras.

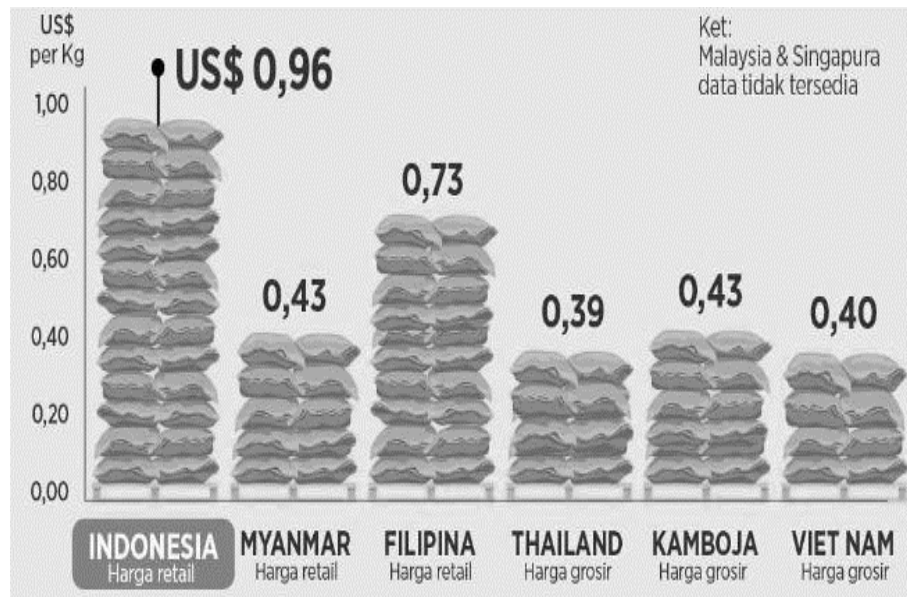
Impor merupakan cerminan kedaulatan ekonomi suatu negara, apakah barang dan jasa buatan dalam negeri masih menjadi tuan di negeri sendiri. Suatu negara melakukan impor karena mengalami defisiensi (kekurangan/ kegagalan) dalam menyelenggarakan produksi barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi penduduknya. Alasan suatu negara melakukan impor, karena ada kegagalan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri (Husna, 2010) Suatu negara tidak mampu menyediakan kebutuhan beras terjadi akibat negara tersebut tidak dapat memproduksi secara efisien.

Salah satu komoditi pangan yang mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia adalah beras, karena beras merupakan makanan pokok bagi hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Hampir 97% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok utama. Hal ini mengindikasikan ketergantungan terhadap beras sangat tinggi (Louhenapessy, dkk. 2010).

Konsumsi beras rata-rata penduduk Indonesia tahun mencapai 139,15 kilogram per kapita per tahun, sementara jumlah beras yang dikonsumsi langsung di dalam rumah tangga berdasarkan data sebesar 100,76 kg/kapita/tahun. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang hanya mengkonsumsi beras sebanyak 40 - 80 kilogram per kapita per tahun. Sementara standar FAO untuk konsumsi beras adalah 60 – 65 kilogram per kapita per tahun. Hal ini berarti bahwa konsumsi beras penduduk Indonesia telah melebihi standar kecukupan global.

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 adalah 273.879.750 jiwa. Jika angka ini dikalikan dengan rata-rata kebutuhan rakyat Indonesia akan beras yakni 139,15 kg/kapita/tahun atau sekitar 0,4 kg/orang/hari, maka kebutuhan akan beras akan mencapai ratusan juta ton per hari. Sementara produksi beras dalam negeri menurut Departemen Pertanian (2022) hanya sebesar 31,36 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi beras dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu Indonesia harus mengimpor beras dari luar agar rakyat tidak kelaparan. Namun disisi lain menyebabkan ketergantungan terhadap impor beras semakin meningkat.

Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia yang termahal di antara negara-negara Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. Tingginya harga beras menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Harga eceran beras Indonesia 28% lebih tinggi dari harga di Filipina dan dua kali lipat harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand.



Gambar 1.
Perbandingan Harga Beras di Asia tenggara, 2022.

Memiliki luasan lahan pertanian yang cukup besar, tentulah harus dapat menghasilkan beras yang cukup untuk konsumsi penduduknya bahkan hasil produksidapat melebihi kebutuhan akan beras itu sendiri. Pada tahun 2022 impor beras menyeruak karena stok beras bulog yang digadang terus menipis. Rencananya impor beras umum untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang akan dilakukan Perum Bulog hingga 200 ribu ton terus menuai polemik dan ironi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras sebanyak 301,7 ribu ton pada periode Januari-Oktober 2022. Jumlah tersebut susut 20,4 juta ton (6,34%) dibanding Januari- Oktober 2021. Kemudian nilai impor beras nasional periode Januari-Oktober 2022 mencapai US\$137,42 juta, turun 5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Besarnya impor yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari besarnya kebutuhan beras di Indonesia dan juga dipengaruhi oleh harga beras dalam negeri. Harga beras dalam negeri dianggap terlalu mahal apabila dibandingkan dengan harga beras dunia yang saat ini berkisar Rp.11.000/kg- Rp.12.000/kg.

Menurut Khotimah (2017), dalam hal ini pemerintah harus lebih meningkatkan kesejahteraan para petani mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Sektor pertanian merupakan sumber pertumbuhan output nasional, sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB dari keseluruhan sektor perekonomian Indonesia. Meskipun secara absolut masih lebih kecil dari sektor lainnya seperti jasa dan manufaktur namun sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk penelitian lebih lanjut dengan judul Analisis Kebijakan Impor Beras Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Indonesia.

Beras merupakan salah satu komoditas penting dalam sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Posisi komoditas beras bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah sebagai makanan pokok karena hampir seluruh penduduk Indonesia membutuhkan beras sebagai bahan makanan utamanya disamping merupakan sumber nutrisi penting dalam struktur pangan, sehingga aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Pengenalan komoditi beras kepada masyarakat bukan pegkonsumsi nasi telah mengakibatkan permintaan beras mengalami peningkatan sepanjang tahun. Masyarakat Papua yang sebelumnya adalah pegkonsumsi sagu sebagai makanan utama, saat ini telah terbiasa dengan konsumsi nasi dalam keseharian mereka, begitu juga dengan masyarakat Maluku, Sulawesi Utara, Madura dan sebagainya.

Beras adalah makanan pokok berpati yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Lebih dari 50 persen jumlah kalori dan hampir 50 persen jumlah konsumsi protein berasal dari beras. Dengan meningkatnya pendapatan dapat diperkirakan bahwa peranan beras sebagai sumber energi bagi tubuh manusia dimasa mendatang akan semakin besar, oleh karena itu sejak REPELITA III pemerintah memberikan prioritas pada kebijakan pangan yang mengutamakan makanan pokok berpati lainnya

untuk mengisi kekurangan beras. Mengingat pentingnya beras untuk rata-rata orang Indonesia akan mengakibatkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan, jika hal itu terjadi akan menimbulkan pengaruh yang tidak stabil pada harga-harga serta dapat menimbulkan reaksi politik dan sosial yang tidak dikehendaki yang cenderung menghambat kegiatan pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Mears, 1982).

Makin pesat pertambahan penduduk Indonesia mengakibatkan tuntutan pemenuhan jumlah (kuantitas) produksi beras juga terus meningkat. Di sisi lain, dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat serta dengan bertahap mengubah pola konsumsi dan cara pandang masyarakat terhadap mutu (kualitas) pangan yang dikonsumsi. Perbaikan daya beli masyarakat yang diharapkan meningkat setelah Indonesia keluar dari krisis ekonomi akan menggeser peta permintaan ke arah bermutu tinggi (Hasbullah dan Bantacut, 2006).

Berbagai pengertian impor dikemukakan sebagai berikut:

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima/importir (Andi Susilo, 2013);

Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjual, agen-agen, pembeli kulakan, para penjual dan distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri (Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, 2013);

Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Jadi, kesimpulan impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal disebut juga barang impor (I Komang Oko Berate, 2014). Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintas batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang (Ali Purwito dan Indriani, 2015).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga dan membina terbentuknya suatu stabilitas ekonomi. Mengapa dikatakan demikian, kondisi ini sangat diperlukan dalam meminimalkan terjadinya suatu kecemburuan sosial dalam suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat membutuhkan suatu kebijakan serta peran pemerintah untuk mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian negara.

Selain itu sejahtera (*well-being*) dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan pada kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai *a condition or state of human well-being*. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia dapat memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, mempunyai banyak faktor keberhasilan yang bisa diukur. Dimana tingkat kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dilihat dari presentasi tingkat perekonomian. Seperti terentaskannya masyarakat tersebut dari kemiskinan, memiliki jaminan kesehatan yang lebih baik, dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dan produktivitas masyarakat meningkat.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan suatu keadaan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang kondisi yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan impor beras terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Kebijakan impor beras akan mempengaruhi harga gabah dan beras di tingkat petani dan direspon oleh perubahan tingkat kesejahteraan petani beras itu sendiri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang meliputi literatur yang mendukung penelitian dan lembaga- lembaga instansi pemerintah dan lembaga- lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

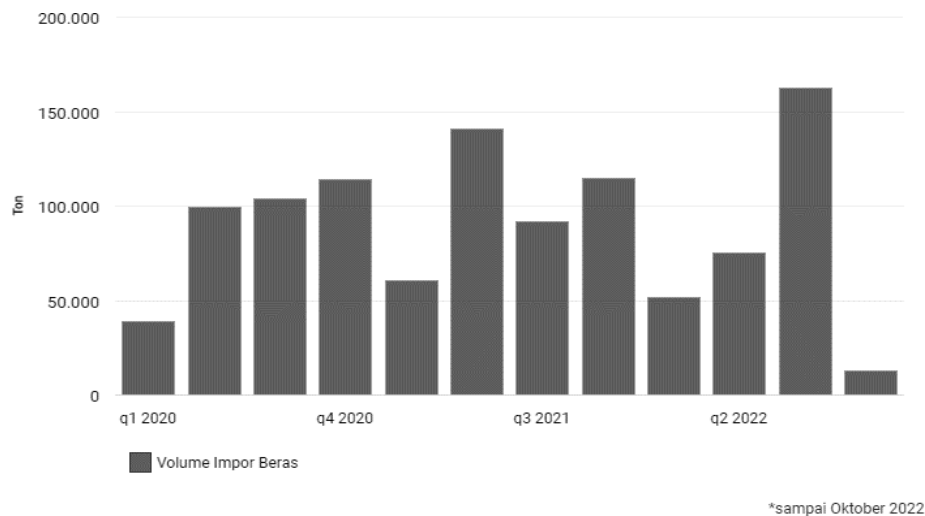
Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik, Food and Agriculture Organization (FAO), World Bank, UN Comtrade, Outlook Komoditas Tanaman Pangan, Badan Urusan Logistik (BULOG) dan sumber lain yang dapat menunjang penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan ditabulasi serta dianalisis sesuai dengan tujuan mengikuti alur sistematika pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Beras Indonesia

Saat ini ada banyak negara yang menghadapi ancaman krisis akibat naiknya harga komoditas pangan dan energi. Ada berbagai prediksi tentang situasi global ke depan bahwa banyak negara di dunia rakyatnya terancam menghadapi kerawanan pangan akut. Hampir tiga tahun pandemi, lalu konflik dan perang di Ukraina, telah membawa dampak krisis ekonomi, energi, dan pangan ke seluruh dunia. Beruntungnya, di tengah kondisi ini Indonesia diperkirakan masih mampu menjaga stabilitas produksi padi dan beras seperti lima tahun terakhir.

Pasalnya, beberapa waktu lalu Indonesia sempat meraih penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil mencapai swasembada beras sepanjang periode 2019- 2021.



Gambar 2.
Produksi Padi dan Produksi Beras Indonesia (2018-2022)

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperkirakan produksi padi nasional tahun 2022 ini akan meningkat sebanyak 1,25 juta ton gabah kering giling (GKG) atau tumbuh 2,31% dibanding tahun lalu, sehingga produksi totalnya bisa mencapai 55,67 juta ton GKG. Produksi GKG tersebut bisa dikonversi menjadi 32,07 juta ton beras untuk konsumsi masyarakat sampai akhir 2022. Produksi beras ini pun meningkat 720 ribu ton atau tumbuh 2,29% dibanding tahun lalu.

Berikut rincian perkiraan produksi padi Indonesia sepanjang tahun 2022 menurut BPS:

Januari-September 2022: 45,43 juta ton GKG;
Oktober-Desember 2022: 10,24 juta ton GKG; dan
Total (Januari-Desember 2022): 55,67 juta ton GKG;

Sedangkan ini produksi padi yang dikonversi menjadi beras untuk tahun 2022:

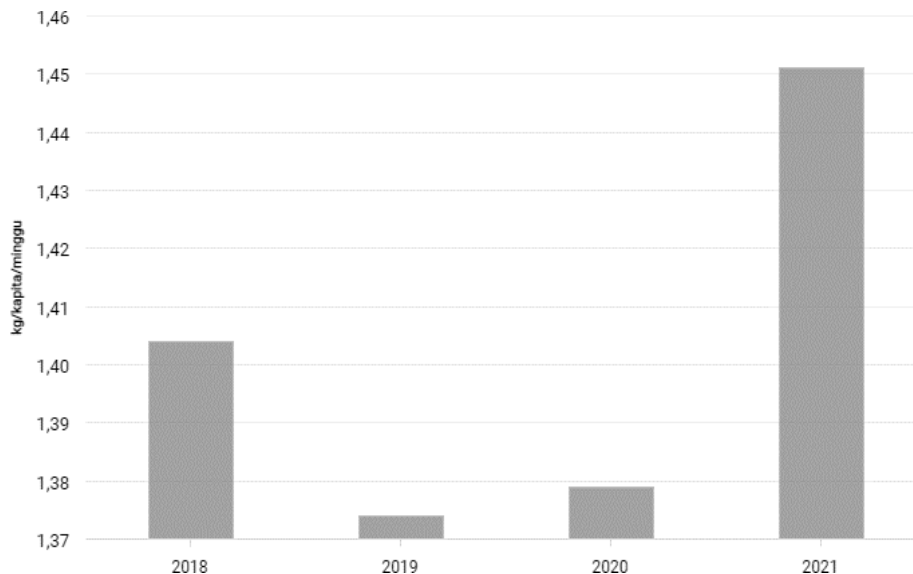
Januari-September 2022: 26,17 juta ton beras;
Oktober-Desember 2022: 5,9 juta ton beras; dan
Total (Januari-Desember 2022): 32,07 juta ton beras

Naiknya produksi padi tidak terlepas dari luas panen padi nasional yang meningkat 194 ribu hektare atau bertambah 1,87% dibanding tahun lalu, sehingga totalnya menjadi 10,61 juta hektare pada 2022.

Konsumsi Beras Indonesia

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi beras penduduk Indonesia secara rata-rata mengalami peningkatan sejak pandemi.

Pada 2018 konsumsi beras dari semua jenis, termasuk beras lokal, kualitas unggul, dan impor, rata-ratanya mencapai 1,404 kg per kapita per minggu. Jumlah ini kemudian sempat turun menjadi 1,374 kg per kapita per minggu pada 2019.



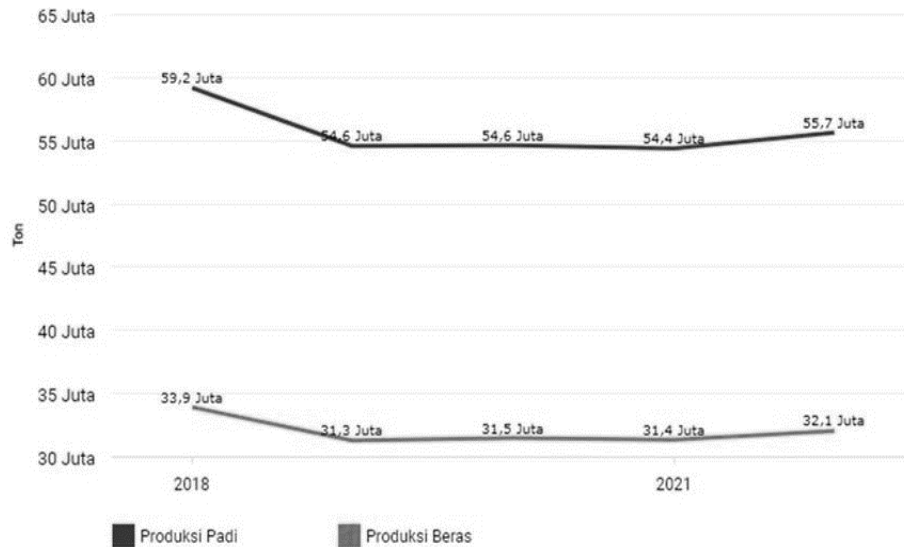
Gambar 3.
Rata-rata Konsumsi Beras di Indonesia (2018-2021)

Namun, ketika pandemi melanda, rata-rata konsumsinya naik ke 1,379 kg per kapita per minggu. Konsumsinya juga terus bertambah pada tahun kedua pandemi, yakni menjadi 1,451 kg per kapita per minggu pada 2021.

Adapun harga beras di Tanah Air tercatat mengalami tren kenaikan pada kuartal III-2022. Walaupun tak begitu drastis, peningkatan harga sudah tercatat sejak Agustus 2022. Kemudian kenaikan berlanjut pada September 2022 setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Perkembangan Impor beras Indonesia

Indonesia termasuk negara yang banyak memproduksi beras di dunia, namun Indonesia masih tetap merupakan negara importir beras. Situasi ini disebabkan karena para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal ditambah dengan konsumsi perkapita yang besar dan dengan jumlah penduduk yang besar pula. Bahkan, Indonesia memiliki konsumsi beras perkapita terbesar di dunia setiap orang Indonesia mengkonsumsi sekitar 140 kilogram beras per tahun.



Gambar 4.

Volume Impor Beras Indonesia (Kuartal I 2020–Kuartal IV 2022*) Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras sebanyak 301,7 ribu ton pada periode Januari–Oktober 2022. Jumlah tersebut susut 20,4 juta ton (6,34%) dibanding Januari–Oktober 2021. Kemudian nilai impor beras nasional periode Januari–Oktober 2022 mencapai US\$137,42 juta, turun 5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Seperti terlihat pada grafik, dalam tiga tahun terakhir volume impor beras Indonesia mencapai level tertinggi pada kuartal III 2022, yakni 162,22 ribu ton. Jumlah tersebut melonjak 116% dibanding kuartal sebelumnya, serta naik 76,3% dibanding kuartal III tahun lalu.

Berikut rincian volume impor beras Indonesia periode Januari–Oktober 2022:

Kuartal I: 51.408,05 ton;

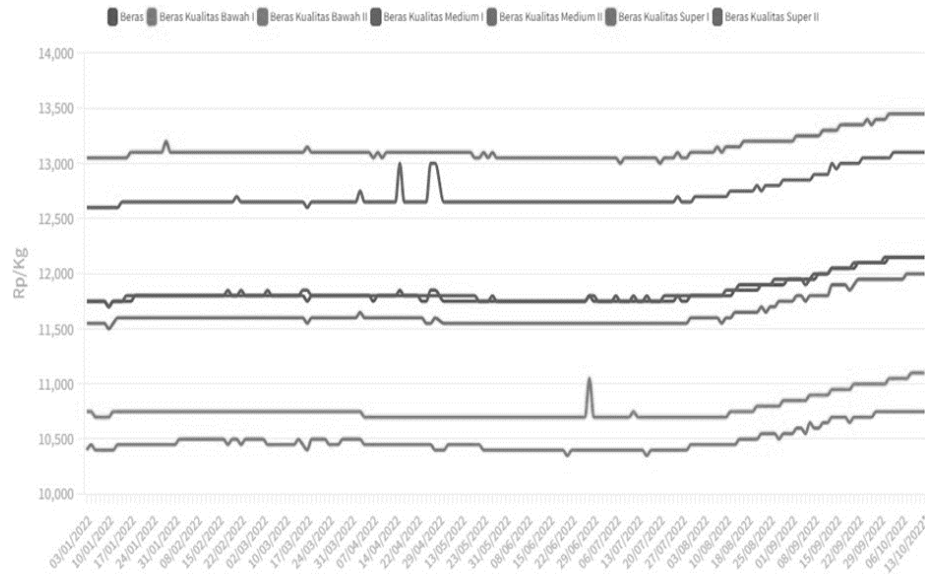
Kuartal II: 75.075,08 ton;

Kuartal III: 162.224,02 ton; dan

Kuartal IV (sampai Oktober): 12.999,01 ton.

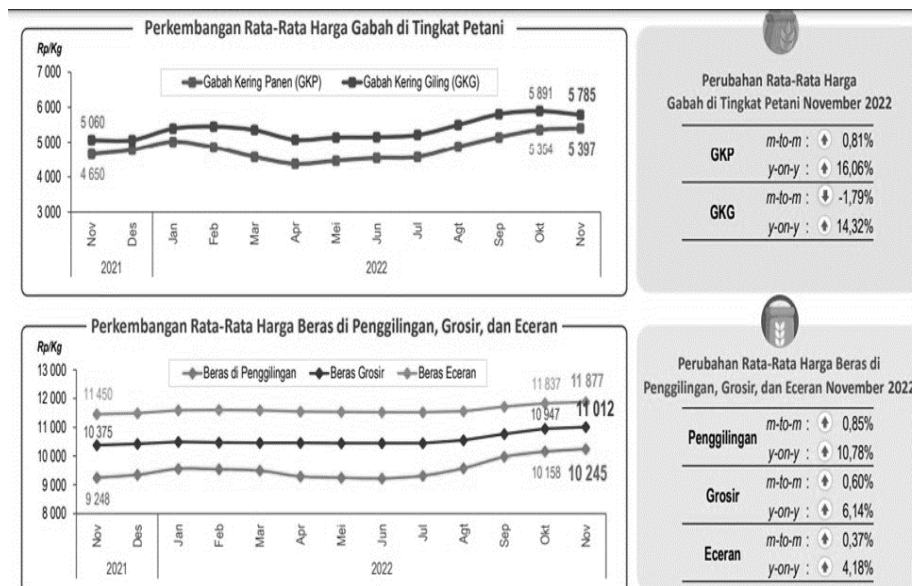
Perkembangan Harga Beras dan Gabah Dalam Negeri

Harga komoditas beras merupakan harga yang pergerakannya terus dipantau dan diintervensi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena harga beras memberi kontribusi pada ketahanan pangan, kemiskinan, stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara. Pergerakan harga beras sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, faktor pertama adalah faktor ketersediaan beras itu sendiri yang bersumber dari hasil produksi panen para petani padi di daerah sentra produksi. Faktor kedua yaitu faktor permintaan dari konsumen, dimana adanya peningkatan dan penurunan permintaan konsumen bisa mempengaruhi harga beras terutama dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. Faktor ketiga yaitu faktor distribusi, faktor distribusi mampu menjadi pemicu kenaikan dan penurunan harga beras.



Gambar 5.
Perkembangan Harga Beras di Pasar Domestik Tahun 2022

Harga beras di pasar tradisional sejumlah wilayah terpantau stabil. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) rata-rata harga beras dibanderol pada Rp12.150/kg. Secara rinci, harga beras kualitas bawah I stabil pada Rp11.100/kg, beras kualitas bawah II tak beranjak dari harga Rp11.100/kg. Selanjutnya, harga beras kualitas medium I tetap dibanderol pada Rp12.150/kg, dan beras kualitas medium II dipatok pada harga Rp12.000/kg. Sementara itu, harga beras kualitas super I juga stabil pada Rp13.450/kg dan beras kualitas super II tetap di harga Rp13.100/kg. Meskipun sepanjang bulan ini pergerakan beras stabil, tetapi komoditas pangan nasional itu tercatat naik Rp150/kg atau 1,26% sepanjang bulan lalu menjadi Rp12.100/kg dari Rp11.950/kg. Kenaikan harga beras beberapa waktu lalu terjadi akibat pasokan beras yang berkurang, adanya pembelian rush untuk bansos, hingga naiknya harga gabah.



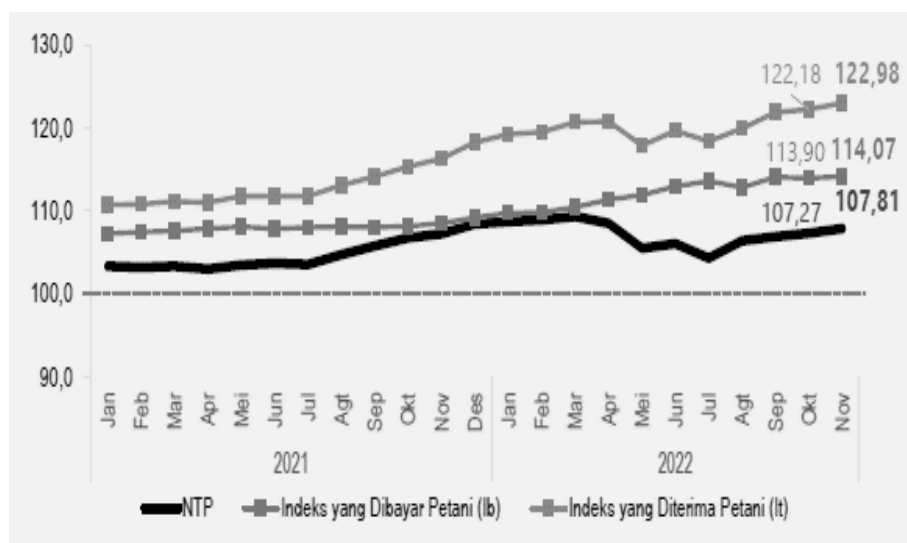
Gambar 6.

Rata-Rata Harga Gabah Di Tingkat Petani & Harga Beras Di Penggilingan, Grosir, Dan Eceran

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP

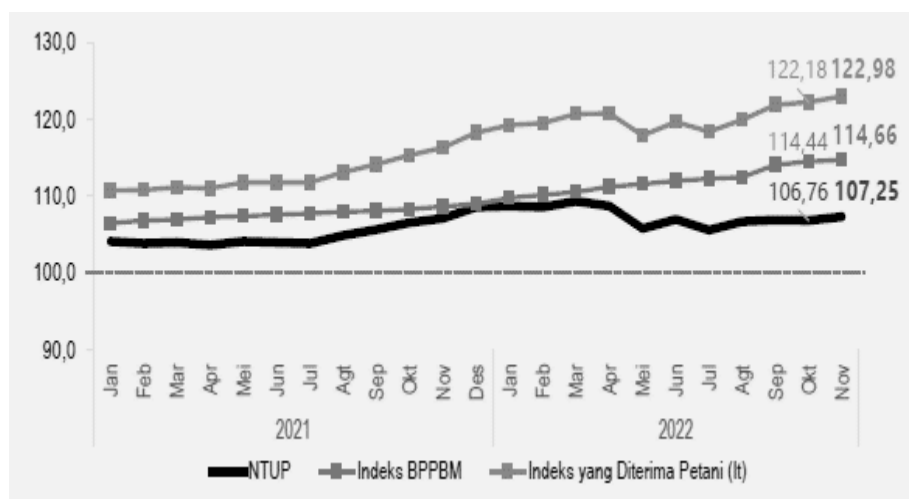
nasional November 2022 sebesar 107,81 atau naik 0,50 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,29 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mengalami penurunan sebesar 0,13 persen.



Gambar 7.

Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2022

Berdasarkan pengamatan selama 2022, kenaikan NTP tertinggi terjadi di Bulan Agustus yaitu sebesar 1,97 persen dimana Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami kenaikan NTP tertinggi yakni 5,86 persen. Sementara itu penurunan NTP terbesar terjadi pada Bulan Mei sebesar 2,81 persen yang dipengaruhi oleh penurunan NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 9,29 persen.



Gambar 8.

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) tahun 2022

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dengan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional November 2022 sebesar 107,25 atau turun 0,46 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Ilmu ekonomi menyebutkan bahwa permintaan menunjukkan jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada periode waktu dan keadaan tertentu. Periode waktu tersebut bisa satu tahun dan keadaan-keadaan yang harus diperhatikan antara lain harga barang yang akan dibeli, harga-harga dan adanya barang saingan, harapan akan terjadinya perubahan harga, pendapatan konsumen, selera dan

preferensi konsumen, biaya iklan dan lain-lain. Jumlah barang yang akan dibeli konsumen (permintaan akan barang) tergantung kepada semua faktor diatas (Arsyad, 2008).

Menurut Daniel (2002), permintaan (*Demand*) adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu pasar. Sementara pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen atas barang – barang ekonomi. Sebagian ahli mengatakan bahwa pengertian permintaan adalah jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada suatu tempat dan waktu tertentu dengan harga yang berlaku pada saat itu.

Penawaran (*supply*) didefinisikan sebagai hubungan statis yang menunjukkan berapa banyak suatu komoditas yang ditawarkan (untuk dijual) pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga ketika faktor lain tidak berubah (Tomek and Robinson, 1990). Kurva penawaran menunjukkan hubungan positif antara jumlah komoditas yang akan dijual dengan tingkat harga dari komoditas tersebut. Kenaikan harga dari suatu komoditas pada saat faktor lain tidak berubah akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah komoditas yang ditawarkan. Demikian juga sebaliknya, apabila harga komoditas tersebut turun, maka akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah komoditas yang ditawarkan.

Berdasarkan uraian tersebut agar jumlah barang dibutuhkan atau permintaan (Q_d) relatif sama dengan jumlah barang yang akan ditawarkan (Q_s) maka pemerintah perlu melakukan yang namanya impor agar $Q_d = Q_s$, harga seimbang. Jika $Q_d > Q_s$ maka P (harga) akan naik, kenaikan harga ini membuat pemerintah tidak suka. Karena akan mengganggu kestabilan harga dan akan berdampak pada komoditas yang lainnya. Sedangkan jika $Q_d < Q_s$ maka P (harga) akan turun. Hal ini yang paling ditakuti pemerintah karena akan menimbulkan pengangguran yang berakibat pada tindakan kriminalitas yang merebak dan daya beli masyarakat pun jika ikut berkurang.

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang salah. Seharusnya kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh petani dalam negeri. Akan tetapi kebijakan impor itu dilakukan untuk menjaga harga stabilitas agar tetap stabil. Dampak positif dari impor beras bagi Indonesia adalah penduduk tidak mengalami kekurangan stok pangan karena terpenuhinya kebutuhan pangan. Bagi petani sendiri, impor beras dapat memacu petani untuk meningkatkan kualitas panen beras yang lebih baik dari pada panen sebelumnya. Namun dampak negatif dari adanya aktivitas impor beras yaitu berkurangnya devisa Negara karena mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan kegiatan impor beras tersebut. Pemerintah pun cenderung lebih memprioritaskan impor beras daripada memberikan intensif kepada petani di Indonesia, dengan ini harga beras lokal akan semakin mahal.

Untuk jangka pendek impor beras yang dilakukan pemerintah adalah untuk menghindari terjadinya lonjakan kebutuhan seperti pada kegiatan hari besar agama contohnya hari raya idul fitri dan lain-lain yang sifatnya situasional maka impor beras menjadi jalan satu-satunya. Sedangkan untuk jangka menengah kebijakan impor beras akan bergeser menjadi berkurang, karena pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan produksi dalam negerinya dalam 2-3 tahun. Tetap ada impor beras tetapi semakin berkurang. Untuk jangka panjang impor beras ini tidak boleh dilakukan lagi oleh pemerintah dan kebutuhan pokok harus dipenuhi di dalam negeri dan akan menjadi kebijakan strategis untuk menjaga stok jika terjadi suatu konflik. Dan diharapkan di tahun 2045 dimana 100 tahun Indonesia Merdeka atau yang disebut juga dengan Generasi Emas, pemerintah tidak lagi mengimpor beras.

Undang-Undang 18/2012 menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama dan mempengaruhi kehidupan setiap manusia. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani.

Di Indonesia, kebutuhan pangan identik dengan pemenuhan beras sebagai makanan pokok. Beras merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak diusahakan oleh para petani dan ketersediaannya sangat mempengaruhi ketahanan pangan (Wijaya, dkk 2013).

Beras memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Sistem agribisnis beras berperan dalam (Suryana dan Kariyasa, 2008): 1) Pemantapan ketahanan pangan, 2) Menciptakan lapangan kerja, dan 3) Upaya pengentasan kemiskinan.

Peningkatan produksi beras terkendala kecilnya kapasitas petani dan kemiskinan. Skala usaha yang dikelola petani relatif sempit/kecil. Rata-rata luas garapan petani padi hanya sebesar 0,3 hektar. Di samping itu, sebagian besar petani padi belum sejahtera dengan pendapatan rata-rata petani dari usaha tani padi hanya sekitar 30 persen dari total pendapatan keluarganya. Sekitar 70 persen petani

khususnya buruh tani dan petani skala kecil termasuk golongan masyarakat miskin dan sekitar 60 persen petani padi adalah net consumer beras (Suryana dan Kariyasa, 2008).

Beras merupakan komoditas dengan permintaan yang inelastis, yaitu perubahan harga hampir tidak menyebabkan perubahan jumlah permintaan konsumen. Apabila ketersediaan kurang, harga cenderung naik sehingga tidak terjangkau oleh konsumen, khususnya masyarakat berpendapatan rendah/ miskin (Haryati dan Hendrati, 2010).

Kebijakan impor beras dapat menstabilkan harga beras dalam waktu relatif singkat. Di sisi lain, Pemerintah perlu memperhatikan kepentingan petani padi dalam rangka peningkatan produksi padi guna menjaga stabilitas harga bahan makanan dalam jangka panjang (Widiarsih; 2012, dan Hessie; 2009).

Pemerintah dapat menetapkan kebijakan perdagangan internasional, termasuk di bidang impor. Melalui kebijakan di bidang impor tersebut Pemerintah mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi/mendorong perekonomian domestik dan penghematan devisa (Febriyanti, 2012).

Salah satu sumber penerimaan perpajakan dalam APBN berasal dari bea Masuk. Undang-Undang 17/2006 mendefinisikan bea masuk sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Timbulnya kewajiban pembayaran bea masuk ketika barang impor masuk ke dalam daerah pabean seluruh wilayah Republik Indonesia.

Impor dapat diartikan sebagai kegiatan penerimaan barang yang diproduksi di Negara lain untuk dijual di pasar dalam negeri (Febriyanti, 2012). Berkenaan dengan kegiatan impor, terdapat 3 kebijakan perdagangan yang dapat diterapkan, yaitu: pengenaan tarif impor (bea masuk), penetapan kuota impor, dan pemberian hak monopoli impor atau pembatasan terhadap jumlah importir (Wibowo, 2011).

Pengenaan tarif impor atau Bea Masuk umumnya digunakan Pemerintah sebagai proteksi atas sektor/bidang ekonomi tertentu sesuai dengan potensi ekonomi nasional yang akan dikembangkan. Di samping berfungsi untuk mengatur (fungsi regulend), tarif bea masuk bertujuan sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi budgeter) dan fungsi pemerataan (pemerataan distribusi pendapatan nasional) (Hardono, dkk 2004).

Pemberlakuan bea masuk akan memberikan penerimaan kepada pemerintah dan meningkatkan surplus atau keuntungan produsen. Mengingat bea masuk merupakan pajak tidak langsung, beban tarif impor atau bea masuk akan ditransfer ke produk, mendorong kenaikan harga produk, sehingga mengurangi surplus atau keuntungan konsumen dan kesejahteraan secara umum (Hardono, dkk 2004).

Tujuan dari kebijakan bea masuk adalah: 1) peningkatan pendapatan petani dan produksi beras, 2) mengamankan kebijakan harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah, 3) stabilisasi harga dalam negeri, dan 4) meminimumkan beban anggaran pemerintah untuk mengamankan harga dasar (Haryati dan Hendrati, 2010).

Produksi beras berfluktuasi mengikuti pola tanam, sementara konsumsi beras stabil sepanjang tahun. Surplus beras meningkat padamas panen (bulan Februari-April), sementara pada musim kemarau dan musim tanam (Oktober-Januari) mengalami defisit. Harga beras berpotensi turun ketika produksi melimpah (musim panen) yang merugikan petani, dan sebaliknya harga beras akan naik pada saat defisit yang merugikan konsumen sehingga harga beras akan bergejolak sepanjang tahun. Untuk mengatasi permasalahan terjadi gap antara produksi dan konsumsi, pemerintah mengizinkan impor beras (Prastowo, dkk 2008). Adapun impor beras terutama berasal dari Vietnam, Thailand, Cina, India, Pakistan, dan Amerika Serikat.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, mengatur jenis beras yang dapat diimpor meliputi: 1) Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan, 2) Impor beras untuk bahan baku/penolong (kebutuhan industri), dan 3) Impor beras untuk konsumsi kesehatan (dietary) dan khusus/segmen tertentu. Pihak-pihak yang dapat melakukan impor beras adalah: Bulog, Importir Produsen Beras, Importir Terdaftar Beras, serta Lembaga Sosial atau Badan Pemerintah.

Satu sumber penerimaan pemerintah dalam APBN berasal dari bea masuk impor beras. Besarnya penerimaan pemerintah tersebut, selain dipengaruhi oleh adanya tarif bea masuk beras,

sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah/volume impor beras. Semakin banyak jumlah beras yang diimpor maka penerimaan pemerintah akan semakin bertambah (Widyawati, 2014).

Tingkat keuntungan/profitabilitas ekonomi yang diterima petani tergolong rendah tanpa adanya kebijakan pemerintah. Pengenaan bea masuk akan meningkatkan harga beras sehingga melebihi harga paritas impor. Penetapan bea masuk beras telah berkontribusi dalam menjaga harga Gabah Kering Panen (GKP) di atas harga pembelian yang ditetapkan pemerintah/Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Harga beras impor lebih rendah daripada harga eceran beras lokal medium. Pada tahun 2022, selisih harga beras impor dengan beras domestik semakin lebar dan lebih rendah daripada harga beras domestik di level produsen. Dengan adanya Bea masuk impor beras yang ditetapkan pemerintah, maka selisih antara beras impor dan beras domestik mengecil sehingga menjaga daya saing beras domestik dan melindungi pendapatan/kesejahteraan petani padi.

Kebijakan bea masuk beras berkontribusi dalam mempertahankan tingkat keuntungan petani padi relatif tinggi. Usaha tanaman padi sawah memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman padi ladang, jagung dan kedelai. Kebijakan bea masuk beras dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap kepentingan pendapatan atau keberlangsungan usaha tani padi domestik. Oleh karena itu, kebijakan bea masuk beras masih diperlukan untuk melindungi usaha pertanian subsektor tanaman padi.

Dari sisi pendekatan pembangunan sosial, kebijakan bea masuk beras mendukung pemberdayaan petani. Kebijakan tersebut mendukung keberlangsungan usaha tani padi sehingga memperbesar kesempatan kerja dalam rangka pemberdayaan penduduk miskin, khususnya di perdesaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga stok beras agar tetap aman di saat kondisi tertentu karena kebutuhan beras yang sangat tinggi oleh penduduk Indonesia. Sehingga jumlah barang yang dibutuhkan (Q_d) setidaknya relatif sama dengan jumlah barang yang dipasok (Q_s).

Sedangkan bagi kesejahteraan petani dengan adanya kebijakan impor beras yaitu dengan ditetapkannya bea masuk beras oleh pemerintah mendukung kesejahteraan petani padi. Kebijakan Bea masuk beras melindungi daya saing beras domestik, menjaga stabilitas harga dan penyerapan produksi beras domestik serta mendorong harga Gabah Kering Panen di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah sehingga lebih menguntungkan petani. Kebijakan tersebut mendukung kepastian usaha tani dan peningkatan pendapatan petani padi. Bagi petani sendiri, impor beras dapat memacu petani untuk meningkatkan kualitas panen beras yang lebih baik dari pada panen sebelumnya.

Langkah kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat jangka pendek yaitu seperti dalam situasi yang sifatnya situasional seperti adanya lonjakan kebutuhan di hari besar agama, sedangkan dalam jangka panjang impor beras ini tidak boleh dilakukan lagi dan kebutuhan pokok harus dipenuhi di dalam negeri dan di tahun 2045 yang merupakan tahun generasi emas Indonesia tidak ada lagi adanya impor beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia: berbagai tahun Terbitan. BPS: Jakarta.
- Budiono. 1982. Ekonomi Mikro. Ed ke-2. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Christianto, E. 2013. Faktor yang mempengaruhi volume impor beras di Indonesia. Jurnal JIBEKA.
- Fuad, Noor, dkk. (2004). Dasar-dasar Keuangan Publik. Jakarta: BPPK Departemen Keuangan.
- Hessie, Rethna. 2009. Analisis Produksi dan Konsumsi Beras Dalam Negeri serta Implikasinya Terhadap Swasembada Beras di Indonesia (Skripsi Institut Pertanian Bogor).
- Kusumaningrum, Ria. 2008. Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Terhadap Penawaran Dan Permintaan Beras Di Indonesia. Thesis. Program Pasca Sarjana. Institiut Pertanian Bogor.
- Malian, A. Husni Sudi Mardianto, dan Mewa Ariani. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi, dan Harga Beras serta Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Agro Ekonomi.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.
- Stanton, William J. 1984. Prinsip Pemasaran. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Swasta, Basu DH dan Irawan. M.B.A. 1986. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Edisi ke dua. Penerbit Liberty
- Widiarsih,Dwi. 2012. Pengaruh Sektor Komoditi Beras Terhadap Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan.
- Widyawati, Wiwit, Syafrial, dan Moch. Muslich Mustadjab. 2014. Dampak Kebijakan Tarif Impor Beras Terhadap Kinerja Ekonomi Beras di Indonesia. Jurnal Habitat.